

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era reformasi dapat dinilai kurang pesat. Pada waktu itu, akuntansi sektor publik kurang mendapat perhatian yang serius. Orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan pada sektor industri dan cenderung mengabaikan pembangunan sektor publik.

Menurut Agus Purnomo (2015), dalam penelitiannya bahwa semakin lama organisasi sektor publik kian pesat perkembangannya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Namun, hal tersebut mengakibatkan munculnya fenomena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik dan adanya transparansi dari pemerintah. Selain hal tersebut, timbul tuntutan baru yaitu agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2018:4), *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi: pencapaian

output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil dengan target yang ditetapkan.

Lembaga pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab instansi pemerintah sebagai pemegang amanah (*agent*) kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*), yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN).

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu meningkatkan ekonomi, efisiensi, dan keefektifan. Hal tersebut merupakan indikator dari *value for money*.

Pada tahun 2017 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari KAP Husni, Mucharam dan Rasidi. Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Opini WTP sebatas menunjukkan laporan keuangan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal tersebut belum tentu membuktikan bahwa program yang dilaksanakan berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien (CNN Indonesia, 2017).

Maka dengan ini penulis mengambil judul dalam penulisan karya ilmiah yaitu **“Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan Menggunakan Metode *Value for Money* pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 - 2017”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana tingkat ekonomis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 -2017?

2. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 -2017?
3. Bagaimana tingkat efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 -2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu:

- a. Mengetahui tingkat ekonomis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada pemerintah BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 -2017.
- b. Mengetahui tingkat efektivitas realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 -2017.
- c. Mengetahui tingkat efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 -2017.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan karya ilmiah ini yaitu:

- a. Bagi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Sebagai gambaran dan masukan yang positif bagi BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam merealisasi anggaran pendapatan dan belanja agar berjalan lebih ekonomis, efektif dan efisien.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan penambahan wawasan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu sosial, serta menambah wawasan dalam keilmuan akuntansi pemerintah khususnya yang berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dengan menggunakan metode *value for money*.